

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Aplikasi Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dahran merupakan sebuah kota yang terdapat di Arab Saudi, yang mana kota ini terletak di bagian timur dari Arab Saudi. Dahran juga merupakan pusat administrasi industri minyak yang memiliki perusahaan penambangan minyak ARAMCO (*Arabian Oil Company*). Selain menjadi pusat penambangan minyak Saudi, disana juga terdapat sebuah Pangkalan Militer Amerika Serikat. Pangkalan Militer AS di Dahran ini didirikan pada tahun 1943 dan pembangunannya baru selesai pada tahun 1946.

Pembangunan pangkalan militer AS di Dahran bermula pada tahun 1941 yang mana Pemerintah Saudi Arabia terancam kebangkrutan ekonomi akibat tingginya defisit keuangan. Namun AS memberikan pinjaman yang akan dijamin oleh produksi minyak perusahaan Aramco. Serta krisis pasokan minyak bumi AS untuk pasukan AS di medan pertempuran tidak mencukupi sehingga perlu adanya pengadaan sumber-

sumber minyak baru. Kenyataan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong pembangunan pangkalan militer pertama AS di Dhahran tersebut.<sup>1</sup>

Pangkalan militer AS di Dhahran tersebut memiliki peran penting guna menjaga kedaulatan dan kelestarian kerajaan Saudi, karena memang Saudi Arabia belum menemukan sekutu yang lebih baik dan terpercaya daripada AS untuk melindungi Saudi Arabia itu sendiri. Selain itu juga Pangkalan militer AS berfungsi menjaga stabilitas kawasan di Teluk Persia seperti yang terjadi pada Perang Dunia, Perang Dingin, serta Perang Teluk.

Pada saat pecahnya Perang Dunia II mengubah hubungan antara AS dan Saudi Arabia ke arah persahabatan yang akhirnya pada tahun 1943 ketika staf kepala gabungan AS memutuskan untuk mengamankan pangkalan udara di Timur Tengah yang menghubungkan Kairo dan Karachi. Yang pada akhirnya memudahkan usaha memerangi Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II. Pada saat yang sama, AS membangun pangkalan udara di Abadan, pantai Iran digunakan untuk transit ke Rusia sekaligus sebagai persinggahan ke India. Namun, karena pangkalan Abadan ditinggalkan pada akhir Perang Dunia II, akhirnya AS memilih Pangkalan Dahran di Saudi Arabia dimana terdapat sumur dan instalasi minyak ARAMCO.<sup>2</sup> Perundingan tersebut memperoleh izin dari Saudi Arabia dan melakukan pertemuan secara rahasia karena sebagai perlindungan terhadap Ibn Saud yang mempertahankan sikap netralnya pada Perang Dunia II untuk menghindari resiko pembalasan dari musuh.

---

<sup>1</sup> George Lenczowski, 1992, *Timur Tengah di Kancah Dunia*, Bandung, Sinar Baru, Algensindo

<sup>2</sup> Musthafa Abd.Rahman, 2003. *Geliat Irak Menuju Pasca Saddam*. Jakarta: Buku KompasSafari.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, hubungan AS dan Saudi Arabia semakin erat satu sama lain ditandai dengan ditandatanganinya di Jeddah 15 Juli 1951 Perjanjian Pertahanan yang memperpanjang sewa beli Pangkalan Udara Dahrhan dengan 5 tahun berikutnya. Perjanjian tersebut memungkinkan pemerintah Saudi Arabia membeli perlengkapan militer dari AS dan sebaliknya AS juga akan memberikan pelatihan militer kepada tentara Saudi Arabia. Lalu Persetujuan baru berisi ketetapan perpanjangan bagi periode yang sama.<sup>3</sup>

Seiring dengan menguatnya Perang Dingin, AS melihat bahaya ekspansionisme politik Uni Sovyet di Timur Tengah sehingga AS merasa perlu untuk menangkal ekspansionalisme Sovyet karena pangkalan militer AS di Dharan tersebut ikut berperan untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar dan juga mengusahakan agar sumber-sumber alam di Timur Tengah tidak jatuh ketangan yang Negara lain.<sup>4</sup>

Tantangan terbesar AS di Teluk Persia bisa bewujud politik maupun militer yang berskala regional, eksternal maupun global. Dimasa Perang Dingin, tantangan eksternal dari Uni Sovyet dan regional yaitu konflik vertical antara Sunni dan Syiah, Arabisme dan Pax Iran serta konflik sektarian lainnya.<sup>5</sup>

Sebelumnya pada saat Perang Dunia dan Perang Dingin, strategi keamanan militer AS di Teluk Persia ditopang oleh “*double pillars*”, yaitu Iran sebagai pilar

---

<sup>3</sup> Sidik Jatmika, 2000, *AS penghambat demokrasi*, Yogyakarta, BiGRAF Publishing. Hal 136

<sup>4</sup> Amien Rais, 1988, *Politik dan pemerintahan Timur Tengah*, PAU Studi Sosial, Yogyakarta

<sup>5</sup> Sidik Jatmika, *op.cit* hal 205

militer dan Saudi Arabia sebagai pilar ekonomi. Namun pada tahun 1979, AS kehilangan salah satu pilarnya sehingga kedua pilar (militer dan ekonomi) berada dipundak Saudi Arabia. Konflik yang terjadi di kawasan Teluk Persia belum berakhir sepenuhnya setelah Perang Dunia dan Perang Dingin berakhir. Namun menjadi awal mulanya Perang Teluk.<sup>6</sup>

Perang Teluk I (Perang Irak-Iran) merupakan salah satu perang yang sangat berpengaruh pada dunia dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu dari tahun 1980-1988.<sup>7</sup> Ditengah memuncaknya Perang Teluk I, Kongres AS mengirim peralatan perang muktahir senilai US \$ 825 juta kepada Saudi Arabia berupa 200 tank Bradley, 4460 roket anti tank serta peralatan stasiun penangkap sinyal elektronik pesawat terbang AWACS (*Airbone Warning Control*).<sup>8</sup>

Pada saat terjadinya Perang Teluk I antara Irak-Iran, pesawat AWACS AS mengitari Saudi untuk “menjaga keamanan” Saudi dari kemungkinan melebarnya perang Irak-Iran ke wilayah Saudi. Dizaman Jimmy Carter, AS juga menyetujui penjualan pesawat F-15 kepada Saudi Arabia dengan alasan bahwa Saudi Arabia memerlukan pertahanan yang lebih kuat dari ancaman Negara-negara tetangganya.<sup>9</sup>

Selama terjadinya Perang Teluk I, pangkalan militer AS mengerahkan tidak kurang dari 28 kapal perang dan kapal induk yang dilengkapi helicopter, jet tempur

---

<sup>6</sup> Maya Chadda, 1988, *Paradox of Power*, The United States in South West Asia 1973-1884, hal 39-42

<sup>7</sup> Isawati.2012.*Sejarah Timur Tengah: dari Peradaban Kuno sampai Krisis Teluk I*.Yogyakarta: Ombak

<sup>8</sup> Majalah TEMPO, 7 Mei 1988, hal. 31

<sup>9</sup> Said K.Aburish, 1996, *The Rise, Corruption and Coming Fall of the haouse of Saud*, hal 53

serta rudal untuk melindungi kapal-kapal tanker yang keluar masuk Teluk Persia.<sup>10</sup> Setelah berakhirnya Perang Teluk I, pada tahun 1990 Irak menyerbu Kuwait dan melakukan ancaman untuk menyerbu Saudi Arabia yang mengakibatkan pecahnya Perang Teluk II. Menjelang dan pada saat Perang Teluk II, dari pangkalan AS di Dahrhan melalui peta satelit memberikan informasi akan adanya bahaya maneuver militer Irak.<sup>11</sup>

Pada 17 Januari 1991 saat Perang Teluk II, AS dengan ratusan pesawat tempur memimpin tidak kurang dari 500.000 pasukan multinasional (koalisi anti Irak) melancarkan serbuan yang disebut sebagai “Operasi Badai Gurun (*operation desert storm*)”. Operasi ini bertujuan mengusir Irak dari Kuwait dan melindungi monarkhi sekutu AS di Teluk Persia. AS menempatkan kurang dari 400.000 pasukan di sepanjang pantai timur Saudi Arabia untuk menangkal serbuan Irak dan menyerbu Irak. Serta menempatkan tidak kurang dari 50 buah rudal Patriot untuk mencegat rudal-rudal Scud yang dilontarkan Irak ke berbagai sasaran di Saudi Arabia.<sup>12</sup> Dari pangkalan AS di Dahrhan inilah AS menjaga keamanan Negara-negara Teluk Persia seperti pada perang Teluk I dan perang Teluk II. Pasukan AS di Saudi Arabia yang berpusat di Dhahrhan dan Riyadh berkekuatan 6.200 orang dan dilengkapi dengan 500 rudal Patriot.

Kemudian asal mula Perang Teluk III berawal pada tahun 2003 saat AS berniat menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 177

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> M.Riza Sihbudi, 1991, *Bara Timur Tengah*, Mizan, hal 182

senjata kimia, biologi dan nuklir dengan bukti foto-foto satelit, namun hasilnya PBB tidak menemukan bukti – bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak.<sup>13</sup>

Pada Perang Teluk III ini, AS banyak melakukan invasi terhadap Irak, khususnya kepada Presiden Irak Saddam Husein. Konflik yang terjadi diantara kedua Negara ini berlangsung di kawasan Timur Tengah atau lebih tepatnya di daerah teluk Persia. Dikarenakan oleh keadaan tersebut Pangkalan militer AS di Dahrhan melakukan pertahanan di kawasan Teluk Persia karena melanjutkan kerjasama perlindungan atau keamanan dari Perang Teluk II dengan GCC (*Gulf Cooperative Council*).

Menteri Pertahanan AS, Colin Powel, di awal tahun 1991 M (Rabi'ul Awal 1411 H) menegaskan keberadaan militer AS di Saudi Arabia," Kita tentu saja tidak siap datang setiap 10 tahun sekali untuk memecahkan persoalan-persoalan kawasan ini". Ia menambahkan," Keberadaan AS di Saudi tergantung kepada stabilitas kawasan".<sup>14</sup> Setelah berakhirnya Perang Dunia, Perang Dingin dan Perang Teluk I, II, dan III, berarti tidak adalagi potensi ancaman dari konflik yang terjadi terhadap Saudi Arabia dan Negara-negara di sekitarnya. Dari sini dapat terlihat bahwa Pangkalan militer Dahrhan sudah kehilangannya peranannya dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Setelah kehilangan perannya tersebut, seharusnya Pangkalan militer Dahrhan tersebut sudah tidak diperpanjang lagi kerjasama sewa beli nya atau tidak

---

<sup>13</sup> Musthafa Abd.Rahman, 2003. *Geliat Irak Menuju Pasca Saddam*, Jakarta, buku Kompas Safari

<sup>14</sup> <http://www.arahmah.com/read/2012/05/29/20460-serial-perang-salib-modern-1-pasukan-koalisi-salib-di-jazirah-arab-menjajah-jantung-dunia-islam.html>

dipertahankan, namun kenyataannya sampai sekarang pangkalan militer AS di Dhahran masih dipertahankan oleh Saudi Arabia dan Amerika Serikat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu: **“Mengapa Amerika Serikat masih mempertahankan Pangkalan Militernya di Dhahran? “**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisa dan menjelaskan pokok permasalahan diatas dapat digunakan teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy*) bersama-sama dengan konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*).

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Pengertian serupa juga telah dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Ray Olton:

“Foreign Policy is a strategic or planned course of actions developed by the decision maker of a state vis a vis other state or internasional entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest.”<sup>15</sup>

Strategi tersebut merupakan patokan dan menuntun perumusan kebijakan. Strategi adalah pola rencana jangka panjang, yang dipersiapkan berdasarkan

---

<sup>15</sup> Jack C Plano, Roy Olton, *The International Dictionary, the Third Edition*, England: Clio press Ltd, 1982

perhitungan secara matang. Pada prinsipnya, Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu Negara dalam cara mengendalikan hubungan luar negeri sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kepentingan nasional yang dibebankan kepada negara itu oleh rakyatnya.<sup>16</sup>

Sedangkan Mappa Nasrun memberikan konsep Politik Luar negeri sebagai berikut:

“ kebijakan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal “. <sup>17</sup>

Melihat pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang dilakukan suatu negara terhadap Negara lain, dimana kebijakan tersebut memiliki tujuan yaitu kepentingan dari Negara tersebut dengan melihat situasi internal (dalam negeri) dan atau eksternal (luar negeri).

Konsep diatas diperkuat oleh Willian D. Coplin, dimana menurut Willian D. Coplin dalam membuat kebijakan politik luar negeri para pengambil keputusan tidak bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, kebijakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga hal yang mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan politik dalam negeri, yaitu kondisi politik

---

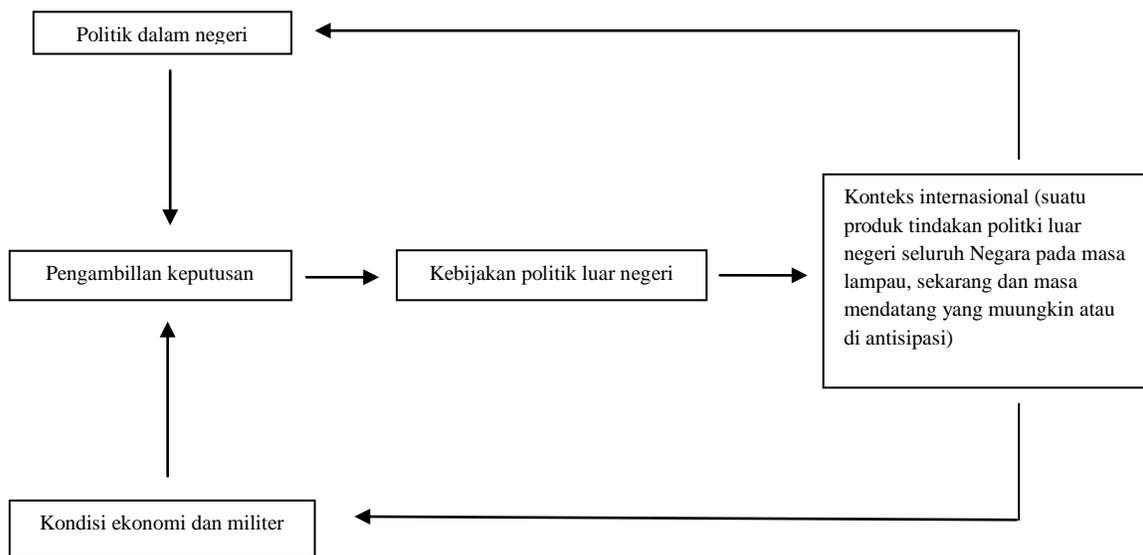
<sup>16</sup>Dudy Singadiloga. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Alumni: Bandung, 1973. Hal 2

<sup>17</sup> Mappa Nasrun, *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problem and Prospect*, Desertasi, Unhas: 1990, hal. 98. Dalam Soft Power dalam Politik luar Negeri Indonesia, F.X. Wawolangi, FISIP UI, 2010 (diakses : <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132946-T%2027791-Politik%20luar-Tinjauan%20literatur.pdf> )

dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional.<sup>18</sup> Jika digambarkan maka hasilnya adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

Proses Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri



*Sumber : William D. Coplin dan Marsedes Marbun “ Pengantar Politik Internasional ”, Bandung, 2003, hal. 30*

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, kondisi politik dalam negeri suatu negara merupakan salah satu variabel penentu dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri, karena terdapat aktor-aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri. Menurut Coplin salah satu aktor tersebut

<sup>18</sup> Willian D Coplin dan Marsedes Marbun.2003.*Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Sinar Baru

adalah birokrasi atau yang di sebut sebagai *bureaucratic influencers*. Kelompok birokrasi sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan politik karena mereka mempunyai akses langsung kepada pengambil keputusan.

Para pengambil keputusan sangat bergantung kepada birokrasi dalam hal informasi-informasi yang penting bagi pembuatan kebijakan serta dalam hal bantuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain kelompok birokrasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik luar negeri karena kelompok ini menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan itu.

Coplin menerangkan bahwa kelompok berpengaruh seperti birokrasi pada sebuah sistem pemerintahan di pengaruhi oleh konteks internasional yang ada, dimana isu yang terjadi pada konteks internasional mempengaruhi usulan yang akan di berikan kepada pembuat kebijakan luar negeri dalam hal ini pemerintah. Beberapa isu dalam konteks internasional yang dimaksud seperti keamanan nasional, kepentingan ekonomi, bidang isu khusus yang berkaitan dengan kepentingan ideologis dan historis, dan masalah-masalah prosedural bagaimana mengupayakan tujuan politik luar negeri.<sup>19</sup> Selain birokrasi seperti departemen pertahanan dan luar negeri, Coplin juga menyebut unsur lain sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yakni partisan influence atau partisan yang mempengaruhi. Seperti Pendapat Presiden Carter, Mustahil militer AS bisa masuk ke Teluk Persia jika AS tidak mempunyai pangkalan-pangkalan udara di Saudi Arabia

---

<sup>19</sup> *Defense Security Cooperation Agency, Security Cooperation Overview and Relationships*, ( diakses : <http://www.dsca.osd.mil/samm/ESAMM/C01/1.htm> )

dan negara-negara Teluk yang lebih kecil lainnya. AS perlu membuat pangkalan-pangkalan udara di sana sehingga bisa menjaga kekuatan darat kita saat membangun rute-rute darat. Tanpa adanya keunggulan pasukan udara, operasi penurunan militer AS apapun di Teluk Persia. Dan Staff Kepala Gabungan AS melihat bahwa Arab Saudi bisa menjadi salah satu Negara yang strategis untuk didirikannya sebuah pangkalan militer.

#### b. Kondisi Ekonomi dan Militer

Tidak hanya pada berdampak beralihnya penggunaan tenaga manusia ke mesin revolusi industri juga membuat perubahan pada kemampuan Negara untuk menciptakan peralatan militer yang kuat untuk mendukung angkatan bersenjata melalui alat-alat industri yang canggih. Negara yang secara militer mapan adalah Negara yang industrinya maju dan apabila kita berbicara tentang militer tentu saja kita harus berbicara tentang perekonomian Negara karena ada kaitannya dengan anggaran pertahanan.

Kondisi ekonomi dan militer merupakan hal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Kondisi ekonomi dan kemampuan militer adalah hal yang tidak dapat di pisahkan berdasarkan yang di jelaskan Coplin bahwasanya pada umumnya, makin tinggi GNP-nya (pendapatan nasional suatu Negara) makin tinggi pula kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer, terutama untuk jangka panjang.<sup>20</sup>

Kemampuan ekonomi yang besar yang diwujudkan dengan besarnya anggaran militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kekuatannya. Dan

---

<sup>20</sup> Willian D. Coplin, Op. Cit. hal. 126

apabila hal sebaliknya terjadi dimana sebuah Negara pemasok utama persenjataan mengalami kesulitan ekonomi tentu akan berdampak pada melemahnya daya beli Negara kepada industri pertahanan oleh karena itu harus ada kebijakan memaksimalkan penjualan ke luar Negara yang perekonomiannya stabil. Dilihat bahwa AS merupakan Negara yang mengkonsumsi minyak dibandingkan dengan penghasilannya memproduksi minyak. Dengan itu AS membutuhkan adanya pengadaan sumber-sumber minyak baru dari Negara lain yang dapat mensuplai minyak untuk pasukannya di medan pertempuran. Dari hubungan AS dan Arab Saudi memiliki hubungan yang baik dalam bidang ekonomi dan juga militer sehingga AS menempatkan pasukannya di Dhahran untuk menjaga suplai minyak dan juga asset ekonomi disana dikarenakan banyak keuntungan yang didapat AS dari kerjasamanya dengan Saudi.

### c. Konteks Internasional

Konteks internasional yang dimaksud Coplin disini ialah produk tindakan politik luar negeri seluruh Negara pada masa lampau, sekarang, dan masa mendatang yang mungkin atau yang akan di antisipasi.<sup>21</sup> Karena politik luar negeri kebanyakan hanya menyangkut pernyataan-pernyataan umum serta rencana -rencana yang bersifat *contingency* (menjaga kemungkinan).<sup>22</sup> Timur tengah merupakan Negara yang yang rawan akan konflik, yang mana ada juga Negara yang kontra dengan adanya AS di timur tengah. Untuk dapat mengambil hati Negara-negara di Timur Tengah, awalnya AS membuat hubungan baik dengan Arab Saudi. Adanya faktor

---

<sup>21</sup> Ibid hal. 30

<sup>22</sup> Ibid hal 33

dari pemerintahan di dalam negeri AS, bahwasanya pemerintah AS membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Negara lain yang ada di Timur Tengah. Yang mana menurut AS, apabila AS dapat mengambil hati pemerintah Arab yaitu Saudi maka AS dapat mempengaruhi pemerintah dinegara-negara sekitarnya. Namun adanya gerakan-gerakan radikal yang mana menurut AS dapat mempengaruhi eksistensinya disana. Yang mana gerakan tersebut berupaya menekan adanya AS di Timur Tengah.

Dari Kondisi dalam negeri, Kondisi ekonomi dan militer dan juga konteks internasional, dapat dilihat bahwa AS memiliki banyak alasan untuk menempatkan pasukannya di kawasan Timur Tengah yang mana dengan adanya pasukan tersebut AS dapat menekan adanya ancaman-ancaman yang menurut AS akan membahayakannya. Dengan adanya Pangkalan Militer di Dhahran, AS memiliki pelindung untuk mempertahankan serta mengamankan posisi dan kepentingannya disana. Sehingga sampai saat ini AS masih mempertahankan pangkalan militernya di Dhahran Arab Saudi.

Pengkajian tentang perilaku suatu negara juga difokuskan pada konteks internasional yang mempengaruhinya. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar Negara dan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana suatu negara akan membuat sebuah kebijakan.

Kebijakan mengenai Teori Proses Pembuatan Keputusan Luar Negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan nasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif

yang ada, dengan perhitungan untung dan rugi atas masing-masing alternatif itu. Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai yang selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya. Mereka diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga biasa melakukan penelusuran terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dari semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>23</sup>

Jadi politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain, politik luar negeri diartikan sebagai tindakan nyata suatu negara dalam mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasionalnya atau lebih tepatnya berdasarkan pada dinamika politik dalam negerinya. Disinilah kemudian ketika perlu juga mengkaji tentang konsep kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, maupun menganjurkan perilaku internasional. Kepentingan nasional sendiri dianggap sebagai faktor yang paling sulit serta berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, karena dalam melakukan interaksi dengan negara lain di lingkungan internasional, setiap negara berupaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negaranya.

---

<sup>23</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 276

Keberhasilan suatu negara juga dilihat dari keberhasilannya dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya karena kepentingan nasional merupakan hal mendasar dari setiap negara. Atas dasar upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu pulalah yang dapat mempengaruhi sikap suatu negara dalam menanggapi isu tertentu dan cara berhubungan dengan negara lain.<sup>24</sup>

Kepentingan nasional sendiri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton didefinisikan sebagai berikut :

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest is typical a highly generalized conceptions of these element that constitute to the state most vital nees. There include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.<sup>25</sup>

Kepentingan nasional memiliki tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri dan ditunjuk untuk ;

1. *Self preservation* merupakan hak suatu negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Self preservation dapat diartikan juga sebagai usaha suatu negara untuk mempertahankan jati diri atau identitas negaranya di tengah perkembangan global, dimana eksistensi menjadi penting dalam pergaulan internasional sebagai bentuk pengakuan suatu negara terhadap

---

<sup>24</sup> T. May Rudy, *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin dalam bab Ketahanan, kekuatan dan Kepentingan Nasional*. Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 118

<sup>25</sup> Jack C Plano, Roy Olton, *The International Dictionary, the Third Edition*, England: Clio press Ltd, 1982

negara lain. Hal ini menjadi penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara dalam pergaulan internasional.

Adanya hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan Saudi Arabia Dalam bidang ekonomi minyak maupun keamanan militer. *Californian Arabian Standart Oil* didirikan sebagai perusahaan penambang minyak,, namun pada tahun 1934 bergabung dengan perusahaan minyak Texas dan berubah nama menjadi *Arabian Oil Company* (Aramco). Dan juga hubungan AS dan Saudi Arabia yang ditandai dengan ditandatanganinya di Jeddah 15 Juli 1951 Perjanjian Pertahanan yang memperpanjang sewa beli Pangkalan Udara Dahrhan dengan 5 tahun berikutnya. Perjanjian tersebut memungkinkan pemerintah Saudi Arabia membeli perlengkapan militer dari AS dan sebaliknya AS juga akan memberikan pelatihan militer kepada tentara Saudi Arabia. Dengan adanya kerjasama tersebut sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya, serta menjaga kredibilitasnya dengan jalan memenuhi komitmen-komitmen AS di Timur Tengah.

2. *Independence* diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan suatu negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dengan tidak terkait atau terjajah oleh negara lain sehingga dapat menentukan sikap dalam menentukan keputusan politiknya. Kemerdekaan tersebut juga akan turut mempengaruhi kelangsungan hidup dan pengakuan suatu negara dalam kancah internasional.
3. *Territorial integrity* dapat diartikan sebagai suatu integritas wilayah. Keutuhan dan kesatuan wilayah merupakan suatu bentuk kedaulatan suatu

negara, dimana kedaulatan tersebut menjadi suatu bentuk eksistensi dan pengakuan tertinggi atas keberadaan suatu negara dalam politik internasional. Kesatuan wilayah juga turut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik suatu negara yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan suatu negara.

4. *Military security* atau keamanan militer adalah hal yang sangat penting bagi stabilitas dan eksistensi suatu negara. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan bahwa negara yang memiliki kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat, maka negara tersebut akan lebih memiliki *bargaining position* dan *power* yang besar dimana dapat mempengaruhi posisinya dalam hubungan antarnegara.
5. Mengenai *economic well-being*, penulis mengartikannya sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi, dimana kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu pilar penyokong bagi kestabilan suatu negara. Kestabilan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Kestabilan ekonomi ini mencakup kestabilan dan keamanan perekonomian termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan asset dan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang terdapat di Saudi Arabia adalah yang terbesar di dunia. Tidak heran bahwa AS mempunyai perusahaan minyak di Dhahran yaitu *Californian Arabian Standart Oil* yang kemudian berubah menjadi Aramco. AS merasa mempunyai kepentingan atas minyak yang ada di Saudi Arabia, dikarenakan wilayah timur tengah masih rawan konflik sehingga AS merasa

memiliki hak untuk melindungi stabilitas minyak dunia yang ada di Saudi tersebut.

Oleh karena itu, karena suatu negara biasanya tidak hanya memiliki satu kepentingan dalam sebuah negara yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan luar negeri suatu pemerintahan. Namun, mereka yang dipilih sebagai calon objek kekuasaan orang lain adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain. Jadi pelaku di kancah politik pada saat yang sama sekaligus sebagai calon majikan dan calon subyek. Selagi ia berusaha memperoleh kekuasaan atas orang lain, orang lain berusaha memperoleh kekuasaan atas dirinya.

Analisis sering memakai konsep “kepentingan nasional” sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Dalam pembahasan mengenai alasan mengapa AS masih mempertahankan pangkalan militernya, penulis memandang bahwa kepentingan nasional yang menjadi fokus adalah *Self preservation and Economic well-being*.

#### **D. Hipotesa**

Dengan memahami latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran yang telah disampaikan, maka dapat ditarik hipotesa yaitu adanya faktor-faktor atau kepentingan yang menjadi alasan Amerika Serikat masih mempertahankan Pangkalan Militernya yang ada di Dhahran :

1. Adanya hubungan baik yang menguntungkan antara AS dan Saudi Arabia yang bertujuan menguatkan hegemoni dan eksistensi AS di Timur Tengah.

2. Mengamankan asset ekonomi dan akses minyak dunia yang ada di Saudi Arabia dan sumber minyak lain yang berada di timur tengah agar sumber alam tersebut tidak jatuh ketangan musuh.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam mengulas kajian ini secara garis besar yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas mengenai alasan AS masih mempertahankan pangkalannya di Dhahran.
2. Dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama di bangku kuliah.

#### **F. Metode Penelitian Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi analisis yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan fenomena berdasarkan hasil pengamatan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan apa saja faktor-faktor yang menjadi alasan Amerika Serikat masih memperthankan pangkalan militernya yang berada di Dharan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literature atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini, bila pokok permasalahan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan informasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Bagi penulis sendiri, penegasan batasan ini akan menjadi pedoman kerja. Penegasan ini berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penelitian. Untuk itu data dalam penulisan ini dari awal perang dunia sampai berakhirnya perang Teluk I pada tahun 1980, II tahun 1990, dan III sampai masa dimana Sadam Husein jatuh tahun 2010, tetapi untuk memperjelas bahasan tidak menutupkemungkinan penulis menambah bahan dari sebelum maupun sesudah periode tersebut dan dapat berkembang sejauh data tersebut dapat mendukung dalam penulisan ini.

Namun demikian, jika nantinya ada pembahasan mengenai masalah yang tidak masuk pada jangkauan yang ditentukan, akan tetap dicantumkan dalam penulisan selama masih memiliki korelatifitas dan relevansi dengan pembahasan utama.

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

**BAB I :** menguraikan dan menjelaskan bagian dasar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Aplikasi Teori, Hipotesa, Tujuan

Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : menjelaskan tentang Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

BAB III : menuliskan mengenai Pangkalan Militer AS di Dhahran

BAB IV : mengkaji dan membahas guna menjawab pokok permasalahan dan hipotesis. Penulis akan menjelaskan kepentingan AS di Timur Tengah sehingga masih mempertahankan pangkalan militernya di Dhahran.

BAB V : berisi kesimpulan dari apa yang ada dari bab-bab sebelumnya.